

Buku

- Abrar, A. N. (2003). *Teknologi Komunikasi : Perspektif Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta : LESFI.
- Abrar, A. N. (2008). *Kebijakan Komunikasi : Konsep, Hakekat dan Praktek*. Yogyakarta : Gava Media.
- Apter, David E. (1985). *Pengantar Analisa Politik*. Yogyakarta : LP3ES.
- Hanif, H. dan Gustomy, R. (2010). Strategi dan Teknik Advokasi Berbasis Jejaring. In Sigit Pamungkas (Ed), *Advokasi Berbasis Jejaring* (pp. 59-84). Yogyakarta : Research Centre for Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM.
- Herry B. dan Priyono, SJ. (2010). Menyelamatkan Ruang Publik. In F. Budi Hardiman (Ed), *Ruang Publik Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis sampai Cyberspace* (pp. 369-398). Yogyakarta : Kanisius.
- Jordan, L. & Tuijl, P. V. (2009). *Akuntabilitas LSM : Politik, Prinsip & Inovasi*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.
- Kasali, Rhenald. (2014). *Let's Change : Kepemimpinan, Keberanian dan Perubahan*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.
- Kurniadi, B. D., & Sigit P. (2010). Evaluasi Advokasi Berbasis Jejaring. In Sigit Pamungkas (Ed), *Advokasi Berbasis Jejaring* (pp. 87-108). Yogyakarta : Research Centre for Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM.
- Kurniawan, N. I. (2010). Advokasi Berbasis Jejaring. In Sigit Pamungkas (Ed), *Advokasi Berbasis Jejaring* (pp. 11-34). Yogyakarta : Research Centre for Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM.
- Laodengkowe, R. (2010). *Mengatur Masyarakat Sipil*. Depok : Piramedia.
- Luhmann, N. (1996). *The Reality of the Mass Media*. (K. Cross, Trans.) California : Stanford University Press.
- Miller, V. & Covey, J. (2005). *Pedoman Advokasi : Perencanaan, Tindakan dan Refleksi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, L.J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif (Ed.Revisi)*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.



- Rakhmat, Jalaluddin. (1993). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Severin, W. J. & Tankard, J. D. (2005). *Teori Komunikasi : Sejarah, Metode dan Terapan*. Jakarta : Prenada Media.
- Sitorus, F.K. (2010). Masyarakat Warga dalam Pemikiran G.W.F. Hegel. In F. Budi Hardiman (Ed), *Ruang Publik Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis sampai Cyberspace* (pp. 123-166). Yogyakarta : Kanisius.
- Topatimasang, R., Fakih, M., Rahardjo, T. (2007). *Mengubah Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Insist Press.
- Wahyono, dkk. (2011). *Ironi Eksistensi Regulator Media di Era Demokrasi*. Yogyakarta : PR2Media.
- Wahyudi, I., et. Al. (2008). *Memahami Kebijakan Publik dan Strategi Advokasi sebuah Panduan Praktis*. Kurniawan & Wahyudi (Ed). Malang : In-Trans Publisihing
- Wayne, P. (2006). *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Wimer, R. D. & Dominick, J. R. (2011). *Mass Media Research : An Introduction*. USA : Wadsworth.
- Winarno, Budi. (2007). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : MedPress.

Jurnal dan Karya Tulis

- Arkanudin. (2006). *Menelusuri Akar Konflik Antaretnik di Kalimantan Barat*. Mediator (Jurnal Komunikasi) Vol.7 No.2.
- Heaney, Michael T. *Linking Political Parties and Interest Group*. The Oxford Handbook of American Political Parties and Interest Group, pp.568---587.
- Mahoney, Christine & Baumgartner, Frank R. (2004). *The Determinants and Effect of Interest Group Coallition*. Chicago: American Political Science Association.
- Nanda, I. R. (2015). *Advokasi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Revisi UU ITE tentang Pasal Pencemaran Nama Baik : Studi Kasus Advokasi oleh Lembaga Studi dan Advokasi (ELSAM) periode 2009 – Februari 2010*. Yogyakarta : Fisipol UGM



Prasetyo, Antonius Galih, (Nov 2012), Menuju Demokrasi Rasional : Melacak Pemikiran Jürgen Habermas tentang Ruang Publik, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 16 No.2

-, (2003). *Strength in Numbers: A Guide to Building Community Coalitions*. Boston : Community Catalyst

Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi Dan Informatika Tahun 2015—2019.

Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat nomor 01/KEP/KIP/III/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat nomor 02/KEP/KIP/X/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota.

Artikel, Koran dan Website

[www.policyproject.com](http://www.policyproject.com/pubs/advocacy/English/Policy%20Proj%20Sec%20I-1.pdf). (1999). *Networking for Policy Change : An advocacy Training Manual* by Policy, Unit I.
<http://www.policyproject.com/pubs/advocacy/English/Policy%20Proj%20Sec%20I-1.pdf>. Diakses pada Rabu, 28 Oktober 2015 jam 08.21 WIB.

Purwansyah, Dede, Berkaca dari pengalaman SAMPAN Kalimantan Provinsi Kalimantan Barat “Mendorong Partisipasi untuk Memperkuat Transparansi”, buletin Intip Hutan – Forest Watch Indonesia edisi Februari-Mei 2015, hal. 17-19.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

ADVOKASI KEBIJAKAN KOMUNIKASI BERBASIS JEJARING (Studi Advokasi oleh Koalisi untuk Keterbukaan Informasi Publik (KKIP) dalam Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010 - 2015)

Laporan Penelitian yang berjudul "Analisa dan Pemetaan wilayah terbuka wilayah tengah Persepsi masyarakat sipil terhadap keterbukaan dan latar belakang di tiap wilayah."

Rencana Strategis Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) 2012 – 2015

Infografis strategic planning LPS-AIR tahun 2016

Pontianak Post "KIP Kalbar Tertahan", edisi Rabu, 18 Juli 2012

Pontianak Post "Ajukan Citizen Law Suit", edisi Kamis, 19 Juni 2014

Pontianak Post "Gubernur Sudah Ajukan 10 Nama", edisi Kamis, 19 Juni 2014

Pontianak Post "Bantah Terima 10 Nama", edisi Jumat, 20 Juni 2014

Pontianak Post "Tunjukkan Bukti Pengiriman Surat", edisi Jumat, 21 Juni 2014

Pontianak Post "Pengumuman Uji Publik" edisi Kamis, 3 Juli 2014

Pontianak Post "Pengumuman Hasil Fit and Proper Test" edisi Kamis, 21 Agustus 2014

www.komisiinformasi.go.id

<https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/ki-pusat-tuntaskan-semilan-sengketa-informasi-di-pontianak-1>, diakses pada 14 Juni 2016 pukul 22.30.

<http://timseleksikipkalbar.blogspot.co.id>

jariborneo.org, diakses pada Selasa 28 Juni 2016 pukul 22.00 WIB

<http://programsetapak.org/id/partner/jari/>, diakses pada Selasa 28 Juni 2016 pukul 22.00 WIB

Buletin Berita Setapak "Keterbukaan Informasi Publik", Edisi Pertama, Februari 2014, hal. 4-5.

Buletin Berita Setapak "Mitra Nasional", Edisi Pertama, Februari 2014, hal. 1.

www.gemawan.org, diakses pada Rabu 29 Juni 2016 pukul 05.00 WIB



<http://gemawan.org/124pembentukankipkalbarmasihdigantunggubernur>, diakses pada 28 Juni 2016, pukul 22.00 WIB.

www.tifafoundation.org

<http://faktakalbar.blogspot.co.id/2011/01/potret-keterbukaan-informasi-anggaran.html>, diakses pada 22 Juni 2016, pukul 09.00 WIB.

<http://seknasfitra.org/perihal/> diakses pada 22 Juni 2016, pukul 08.10 WIB.

www.lps-air.org, diakses pada Rabu 29 Juni 2016 pukul 20.30 WIB.

<http://www.antarakalbar.com/berita/307039/lps-air--indeks-transparansi-pemprov-kalbar-buruk>, diakses pada Rabu 29 Juni 2016 pukul 22.30 WIB.

<http://regional.kompas.com/read/2011/08/05/13584878/Komisi.Informasi.Belum.Terbentuk>, diakses pada Rabu 29 Juni 2016 pukul 22.44 WIB.

<http://www.matakalbar.com/baca/99/2013-08-28/ketidak.jelasan.pembentukan.kid.kalbar>, diakses pada Selasa 9 Agustus 2016 pukul 10.00 WIB

yayasantitian.org, diakses pada Kamis 30 Juni 2016 pukul 06.10 WIB.

<http://yayasantitian.org/post-4>, diakses pada Kamis 30 Juni 2016 pukul 06.33 WIB.

<http://www.sintang.go.id/news/index/519>, diakses pada Kamis 30 Juni 2016 pukul 06.33 WIB.

Buletin Berita Setapak "Pendampingan dan Advokasi", Edisi Pertama, Februari 2014, hal. 7.

sampankalimantan.org

<http://berhaktahu.blogspot.co.id/2015/02/pengalaman-uji-akses-di-kalimantan-barat.html>,

<http://www.pontianakpost.com/dorongketerbukaan>, diakses pada Jumat 30 Juni 2016 pukul 09.41 WIB.

<http://antarakalbar.com/berita/307937/lsmorongpercepatanpembentukankidkalbar>



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

ADVOKASI KEBIJAKAN KOMUNIKASI BERBASIS JEJARING (Studi Advokasi oleh Koalisi untuk Keterbukaan Informasi Publik (KKIP) dalam Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010 - 2015)

https://ruwudemokratia.org/penghiber/advokasi-untuk-keterbukaan-informasi-daerah-kid-kalimantan-barat-segera-bentuk-komisi-informasi-daerah-kid-kalimantan-barat
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

<http://www.ombudsman.go.id/index.php/component/content/archive.html?year=2012&month=7>, diakses pada Selasa 9 Agustus 2016 pukul 12.15 WIB

<http://www.kpi.go.id/index.php/lihat-terkini/23-berita-daerah/31232-anggota-kpid-kalbar-periode-2013-2016-dilantik>, diakses pada hari Kamis 25 Agustus 2016 pukul 07.40 WIB

<https://kpidkalbar.wordpress.com/profil-kpid-kalimantan-barat/sekilas-kpid-kalbar/profil-komisioner/> diakses pada hari Kamis 25 Agustus 2016 pukul 07.40 WIB

ipc.or.id, diakses pada Jumat 5 Agustus 2016 pukul 03.50 WIB.